

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam hal pembangunan. Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus serta berkesinambungan, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan tersebut. Pembangunan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan pendapatan nasional yang bisa digunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran negara, termasuk pengeluaran pembangunan.

Kementrian keuangan mencatat pendapatan negara hingga April 2018 sebesar Rp. 527,8 triliun. Pendapatan tersebut salah satunya disumbang oleh penerimaan pajak sebesar Rp. 383,2 triliun (mandiri.com 2018). Dalam perjalanannya, pajak sa'at ini telah menjadi sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Andriani dalam Brotodiharjo (1995:2-6), “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan setiap pelanggaran atas pajak akan dikenakan sanksi. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dimulai dari tanggal 1 Januari 2001, pelaksanaan otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai sendiri pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang bisa dikembangkan sesuai masing-masing daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pemanfaatan air dalam tanah dan permukaan.

Surabaya merupakan kota metropolitan memiliki begitu banyak kesibukan yang membuat penduduknya lebih menikmati semua jasa yang disediakan daripada melakukannya sendiri. Misalkan dalam hal makanan, sebagian besar penduduk Surabaya yang bekerja lebih memilih jasa yang disediakan oleh restoran dari pada harus memasak sendiri. Hal tersebut membuat kota Surabaya memiliki pendapatan yang signifikan melalui pajak restoran yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Top Noodless Express adalah salah satu restoran di Surabaya yang berlokasi di Tunjungan Plaza 4 Lt. 5 menyiapkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat

yang memiliki kesibukan bekerja. Pada jam makan siang restoran ini ramai dikunjungi pengunjung baik karyawan Pakuwon, karyawan Bank Mandiri yang berada dalam satu area gedung maupun pengunjung mall dari luar pada jam-jam selesai bekerja.

Orang-orang yang selalu memakai jasa restoran pasti sudah tidak asing dengan biaya tambahan atau pajak yang tertera dalam struk pembelian. Kebanyakan orang mengenali pajak restoran sebagai PPN karena tarif yang dikenakan besarnya 10% dari total transaksi. Namun, ternyata anggapan tersebut keliru. Pajak restoran berbeda dengan PPN karena PPN dipungut oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak restoran justru dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut dengan Pajak Pembangunan 1 (PP1).

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin memberikan informasi apakah pemungutan pajak restoran Top Noodless Ekspres sudah sesuai dengan mekanisme yang ada dengan mengangkat judul **“MEKANISME PERHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH (PP1) TERHADAP RESTORAN TOP NOODLESS EXPRESS SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan penulisan studi lapang ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prosedur perhitungan dasar pengenaan pajak, pembayaran dan pelaporan pajak restoran Top Noodless Express.
2. Untuk mengetahui administrasi perpajakan Restoran Top Noodless Express

1.3 Manfaat Studi Lapang

1.3.1 Manfaat bagi mahasiswa

1. Mahasiswa dapat mengembangkan dan mempraktekan ilmu yang di peroleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja (restoran Top Noodle Ekspres)
2. Menambah wawasan mahasiswa terhadap administrasi perpajakan usaha jasa restoran
3. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain (kerja *team*) di dunia kerja

1.3.2 Manfaat bagi perguruan tinggi

1. Untuk mengetahui sejauh mana mahasiswanya bisa menerapkan teori yang sudah didapat di bangku kuliah terhadap dunia kerja.
2. Menciptakan kerja sama antara STIESIA Surabaya dengan instansi
3. Instansi pendidikan (STIESIA) Surabaya dapat meningkatkan mutu lulusannya dari pengalaman studi lapang mahasiswanya.

1.3.3 Manfaat bagi Perusahaan

1. Membina hubungan baik antara perusahaan dan lembaga pendidikan
2. Dapat bertukar ilmu ter *update* dengan mahasiswa

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Obyek penulisan studi lapang untuk tugas akhir ini adalah Restoran Top Nodless Ekspres Surabaya yang merupakan restoran yang berdiri di bawah manajemen dari Top Ten Group Surabaya yang berlokasi di Jl. Basuki Rachmat No 8-13. Tunjungan Plaza 1 LT. 7. Laporan tugas akhir ini dibatasi hanya pada mekanisme atau prosedur Pajak Restoran pada di Restoran Top Noodless Ekspres.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan tiga macam metode dalam pengumpulan data, yaitu tanya-jawab atau interview, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi.

1. Interview dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan tanya jawab kepada pegawai dan staff di Top Noodless Ekspres mengenai mekanisme pelaksanaan kewajiban perpajakan pada restoran tersebut.
2. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan, penelitian dan penganalisaan data yang digunakan restoran Top Nodless Ekspres untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya.

3. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber yang terpercaya, dalam hal ini data-data dan dokumen-dokumen Top Noodless Ekspres dalam prosedurnya melakukan kewajiban perpajakan.

